

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau disebut Pilkada tahun 2020 menjadi sedikit berbeda dengan sebelumnya. Pada Pilkada serentak tanggal 9 Desember 2020 yang mencakup 9 provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten atau secara keseluruhan berjumlah 270 daerah.¹ Pilkada tahun 2020 dilaksanakan pada masa pandemi Covid-19 yang menyebabkan semarak pesta demokrasi menjadi berkurang. Berbagai pembatasan dilakukan agar pelaksanaan Pilkada tidak menimbulkan klaster korban baru positif Covid-19. Pembatasan dilakukan mulai dari sebelum pelaksanaan pemilihan seperti salah satunya kampanye calon kepala daerah. Kampanye lebih banyak dilakukan menggunakan media sosial dan partisipasi di tempat umum dibatasi dengan protokol kesehatan yang ketat.

Selain itu permasalahan krusial yang juga sering terjadi dalam Pilkada yaitu rendahnya partisipasi perempuan sebagai peserta kontestasi. Hal ini dikarenakan adanya hambatan baik ketika pelaksanaan maupun sebelum pelaksanaan. Hambatan yang dihadapi tidak hanya dalam legislatif namun juga lembaga eksekutif. Sejak Indonesia merdeka hingga Orde Baru pemilihan kepala daerah ditetapkan oleh

¹ Kompaspedia.kompas.id. 2020. "Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020". Selengkapnya di <https://kompaspedia.kompas.id/baca/infografik/peta-tematik/penyelenggaraan-Pilkada-tahun-2020>. Diakses pada tanggal 07 September 2022 pukul 20.32 WIB.

pemerintah pusat atau secara jelas masyarakat tidak diberi hak untuk memilih kepala daerah.²

Akhirnya tahun 2003 masyarakat memiliki hak untuk memilih kepala daerah secara langsung. Selain pembatasan hak memilih dari rakyat tetapi juga terdapat pembatasan hak gender untuk menjadi kepala daerah di mana hanya laki-laki saja yang dapat menjadi kepala daerah. Ketika masa pemerintahan Presiden Soeharto segala kebijakan masih bersifat sentralisasi, artinya segala keputusan yang diambil harus sejalan dengan pemerintah pusat dan bisa terjadi ketimpangan kebijakan. Selain itu kepala daerah harus berlatar belakang militer yang mengakibatkan tidak adanya kepala daerah perempuan.³

Kewenangan masyarakat di daerah untuk menentukan kepala daerah juga diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pilkada merupakan alat untuk menunjang kedaulatan rakyat baik di tingkat provinsi dan kota atau kabupaten dengan berpegang teguh dengan Pancasila dan UUD 1945 untuk menentukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Tujuan pemilihan kepala daerah ini untuk menciptakan ruang demokratis bagi rakyat dalam satu wilayah untuk menentukan kepala daerahnya. secara demokratis yakni dipilih langsung oleh rakyat Sesuai dengan amanat Undang-Undang.

² Suyatno. 2016. "Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Tantangan Demokrasi Lokal di Indonesia". *Jurnal Politik Indonesia*. Vol. 1. No. 2. Hlm. 212.

³ Leviane Jackelin, Dkk. 2018. "Perempuan Dalam Politik Di Sulawesi Utara". *Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora*. Vol. 20, No. 2. Hlm. 138.

Demokrasi merupakan asas penting yang dianut oleh Negara Indonesia sejak era reformasi. Semua masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa adanya pengecualian terutama gender. Sebagaimana telah dijelaskan dalam melalui pancasila sebagai pegangan utama yang menegaskan bahwa laki – laki dan perempuan harus mendapatkan keadilan dan kesamaan.⁴ Keterwakilan perempuan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 46. Dari sini sudah terlihat jelas tentang hak keterwakilan perempuan dalam politik. Perlu adanya kebijakan tambahan untuk membantu kuota keterwakilan terpenuhi dalam pemilihan. Kebijakan yang terbentuk adalah kebijakan afirmasi yang disahkan melalui UU No.12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD.

Sebuah kebijakan yang dibentuk agar satu individu atau satu kelompok mendapatkan kesempatan yang sama dengan individu atau kelompok lain disebut dengan kebijakan afirmasi. Kebijakan afirmasi yang dimaksud oleh UU No.12 lebih terfokus kepada kesempatan yang sama untuk perempuan dalam politik. Kebijakan dibentuk bukan hanya untuk menghilangkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Penerapan Kebijakan Afirmasi memberikan dampak yang baik terhadap keterwakilan perempuan dalam parlemen.

⁴ Wibowo, Ananda Rezky. 2017. “Perempuan dan Kepemimpinan Politik (Studi Terhadap Terpilihnya Indah Putri Indriani Sebagai Bupati di Kabupaten Luwu Utara)”, *Skrripsi Thesis*. UIN Alauddin Makassar. Hlm. 1.

Keterwakilan perempuan pada legislatif nasional telah diatur dalam amanat UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu mewajibkan 30% kuota untuk perempuan sebagai calon legislatif dipenuhi peserta pemilu. Berdasarkan pemilu tahun 2019 jumlah keterwakilan perempuan mencapai 20,8% atau sebanyak 120 anggota dari 575 anggota parlemen. Data tersebut meningkat daripada sebelumnya yakni sebanyak 97 orang atau persentase 17,3%. Jika berkaca pada kebijakan afirmasi berarti keterwakilan perempuan sebanyak 30% belum terpenuhi.⁵ Tidak hanya dalam pemilu terjadi rendahnya keterwakilan perempuan, hal yang sama juga terjadi dalam Pilkada. Beberapa tahun sebelumnya, pada saat Pilkada serentak tahun 2015 diikuti oleh 269 daerah baik tingkat provinsi dan kabupaten atau kota. Hasil dari Pilkada tersebut menunjukkan sebanyak 35 calon perempuan terpilih dari 269 daerah.⁶ Jika dihitung berarti hanya mencapai 7,6% keterwakilan perempuan.

Salah satu daerah yang tidak ada terpilih kepala daerah perempuan yakni Provinsi Riau. Sejak tahun 1958 hingga tahun 2003 telah menganut sistem demokratis namun tetap saja tidak ada kepala daerah perempuan terpilih hingga tahun 2019. Provinsi yang berjuduk tanah melayu masih sangat berpegang erat dengan adat dan istiadat. Kebudayaan di ranah Melayu erat kaitannya dengan kebudayaan masyarakat baik dari segi norma dan hukum adat yang berlaku. Raja Ali Haji yang merupakan seorang tokoh pemikir politik Melayu menekankan pentingnya syarat

⁵ *Ibid.* Hlm. 110.

⁶ Rapler.com “35 calon kepala daerah perempuan menang di Pilkada 2015” selengkapnya di <https://www.rappler.com/world/115543-perempuan-menang-di-Pilkada-2015/>. Diakses pada tanggal 16 Maret 2023 pukul 22.40 WIB.

dalam memilih pemimpin. Salah satu syarat memilih pemimpin harus seorang yang berjenis kelamin laki-laki.⁷ Prinsip tersebut terus dipegang terutama dalam partisipasi politik.

Menurut Herbert McClosky partisipasi politik merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok masyarakat yakni dengan ikut andil dalam penentuan pemimpin dan proses pembentukan kebijakan umum serta dalam pengawasan suatu kebijakan.⁸ Salah satu penerapan partisipasi politik adalah keterlibatan mengambil peran dalam ranah publik. Keterlibatan tersebut melibatkan juga perempuan di dalamnya. Pengaruh budaya memberikan pengaruh dalam membentuk *stereotip* masyarakat terhadap kepercayaan kepada perempuan untuk memegang peranan dalam ranah publik. Fenomena yang menyebabkan kesetaraan hak gender yang menjadi masif.⁹ Banyak perempuan tidak memiliki kesempatan untuk terlibat dalam ranah politik terutama pada pengambilan kebijakan. Padahal keterwakilan perempuan di ranah politik penting untuk mempresentasikan hak perempuan. Perempuan juga memiliki hak untuk terlibat aktif dalam pemerintahan seperti menjadi kepala daerah yang bisa diperoleh melalui Pilkada.

⁷ Muhammad Hanif & Dian Dwik Okputra. 2021. "Peran Pemerintah Islam Di Bumi Melayu". *Jurnal Bina Ummat*. Vol. 4, No. 2. Hlm. 15.

⁸ Herbert McClosky dalam Miriam Budiardjo. 2010. "*Dasar-Dasar Ilmu Politik*". Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Hlm. 367.

⁹ Julia Lara Zamzamy. 2019. *Tantangan Partisipasi Politik Perempuan Minangkabau: Studi Kasus Terpilihnya Wali Nagari Perempuan Sulit Air*. Skripsi. Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada. Hlm. 2.

Perempuan perlu memiliki modal yang bisa mendukung untuk terlibat dalam ranah politik. Modal yang diperlukan adalah modal politik yang terdiri dari modal ekonomi, modal sosial, modal budaya, dan modal simbolik. Jika seorang kandidat memiliki modal politik yang lebih besar dari kandidat lain dalam kontestasi. Maka, kandidat tersebut akan memperoleh peluang kemenangan yang lebih besar. Pierre Bourdieu tahun 1986 dalam bukunya *The Forms of Capital*, ada empat bentuk modal politik yaitu modal ekonomi, modal budaya, modal sosial, dan modal simbolik. Meskipun awalnya konsep bourdie terkait dengan juga terkait dengan konsep habitus dan ranah. Namun untuk keluar dari tradisi Marxian menyikapi terkait dominasi yang diasumsikan untuk melacak atau mengakumulasikan kepemilikan modal masing anggota masyarakat. Bourdieu mengembangkan teorinya tidak terfokus pada dimensi ekonomi tetapi juga menambahkan dominasi budaya, sosial dan sebagainya. Tentunya modal politik menjadi penting bagi perempuan untuk terlibat dalam kontestasi pemilihan terutama Pilkada.

Pilkada serentak tanggal 9 Desember tahun 2020 yang dilaksanakan di Provinsi Riau yang diikuti oleh sebanyak 9 kabupaten atau kota dari 12 kabupaten atau kota. Kabupaten atau kota tersebut yakni Kabupaten Bengkalis, Kota Dumai, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir, dan Kabupaten

Kuantan Singingi¹⁰ Salah satu daerah yang melaksanakan Pilkada yakni Kabupaten Bengkalis dipimpin oleh kepala daerah yang disebut dengan bupati. Sejak pertama kali terbentuk menjadi kabupaten hingga tahun 2019 Kabupaten Bengkalis telah dipimpin sebanyak 14 Bupati. Namun dari seluruh bupati yang telah memimpin belum pernah terdapat bupati perempuan.

Tabel 1. 1
Bupati Bengkalis dari Masa ke Masa

No	Nama	Awal Menjabat	Akhir Jabatan
1.	Sumitro	1945	1946
2	Ahmad	1946	1949
3	Muhammad	1949	1953
4	Muktar	1953	1958
5	Abdullah Syafii	1958	1960
6	Zalik Aris	1960	1974
7	Himron Saheman	1974	1979
8	Ismail Yusuf	1979	1984
9	Johan Syarifuddin	1984	1989
10	M. Azaly Djohan	1989	1995
11	Fadlah Sulaiman	1995	2000
12	Syamsurizal	2000	2010
13	Herliyan Saleh	2010	2015
14	Amril Mukminin	2015	2020

Sumber : Diolah oleh peneliti tahun 2023

Tabel di atas memperlihatkan bahwa sejak pertama kali memiliki kepala daerah pada tahun 1945 belum ada dari perempuan yang menjadi kepala daerah di Kabupaten Bengkalis. Tentunya dengan terpilihnya bupati perempuan menjadi fenomena menarik untuk melihat bagaimana tantangan yang dihadapi perempuan

¹⁰ Media Centre Riau.go.id. 2020. “9 Kabupaten dan Kota di Riau akan laksanakan Pilkada” selengkapnya di <https://mediacenter.riau.go.id/read/55720/9-kabupatenkota-di-riau-akan-laksanakan-pilka.html>. Diakses pada tanggal 16 Maret 2023 pukul 22.08 WIB.

untuk berpartisipasi dalam ruang politik di ranah Melayu. Penelitian mengenai modal politik kepala daerah terutama perempuan pada saat ini belum banyak, lahirnya sebuah inovasi baru menjadi harapan peneliti terutama pada analisis kemenangan kepala daerah perempuan. Penelitian terdahulu sebagian besar lebih dominan menganalisis modal politik calon kepala daerah laki-laki, kemudian faktor terpilih yang disebabkan oleh faktor modal politik perempuan secara umum, belum banyak dari penelitian sebelumnya yang membahas mengenai modal politik kepala daerah perempuan. Beberapa Penelitian tersebut terdahulu yang meneliti modal politik perempuan seperti penelitian dari Jumriani, Dkk¹¹, Hadi Machmud¹², Rika Novitasari dan Tikka Dessy Harsanti¹³, Siti Khodijah¹⁴, dan Zahira¹⁵.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang dijelaskan oleh peneliti, peneliti dapat merumuskan bahwa terdapat perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu dilihat berdasarkan fenomena dan kajian penelitiannya. Selain itu penelitian terdahulu juga memiliki kekurangan. Saran untuk penelitian pertama kepada politisi dalam mencapai efektivitas dan efisiensi sebuah kampanye, sangat penting untuk berpedoman pada hasil survei yang telah dilakukan agar strategi lebih terarah.

¹¹ Jumriani, Dkk. 2019. "Perempuan Dan Politik (Strategi Komunikasi Politik Untuk Pemenangan Indah Putri Pada Pilkada Luwu Utara 2015)". *Jurnal Commercium*. Vol. 2, No. 1. Hlm. 1.

¹² Hadi Machmud. 2019. "Perempuan dan Politik Lokal (Studi Kasus Pemilihan Kepala Daerah di Sulawesi Tenggara)". *Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*. Vol. 14, No. 1. Hlm. 91.

¹³ Rika Novitasari dan Tikka Dessy Harsanti. 2019. "Strategi Calon Kepala Daerah Perempuan Dalam Kontestasi Politik Di Kota Batu Tahun 2017". *Jurnal Waskita*, Vol. 3, No. 1. Hlm. 24.

¹⁴ Siti Khodijah. 2021. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemenangan Kepala Daerah Perempuan Di Kabupaten Bekasi". *Jurnal Indonesia Social Sains*. Vol. 2 No. 4. Hlm. 618.

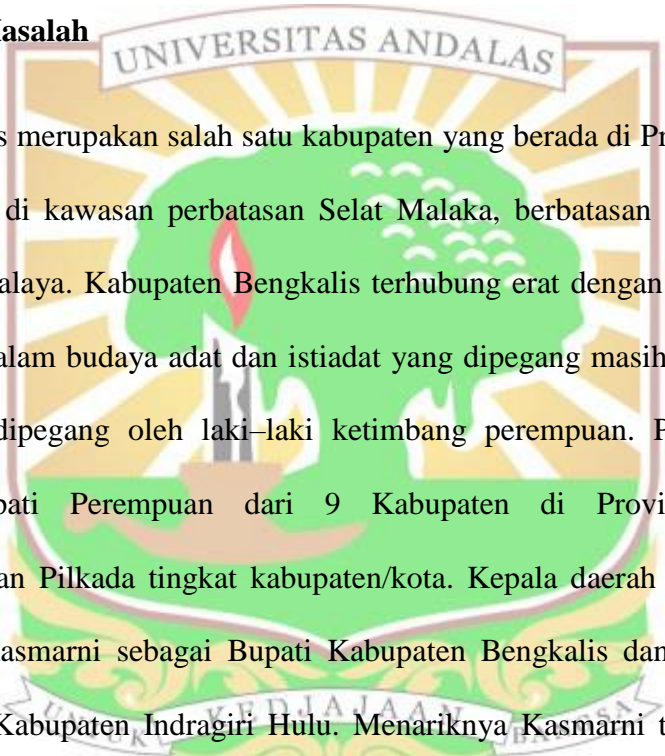
¹⁵ Zahira. 2020. "Strategi Pasangan Calon Bupati Kasmarni dan Bagus Santoso Meredam Isu negatif dalam Pilkada di Kabupaten Bengkalis tahun 2020. *JOM Fisip* Vol. 9, No. 2. Hlm. 10

Kemudian tim pemenangan harus cermat dalam memilih media yang akan digunakan dalam kampanye agar bisa mencapai semua lapisan masyarakat. Kandidat yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah harus melakukan investasi sosial sehingga tidak dianggap sekedar penebar janji oleh masyarakat. Saran terhadap penelitian kedua yakni Hadi Machmud yakni perlunya kebijakan dan desain aturan yang memudahkan syarat pencalonan bagi perempuan. Seperti syarat minimal yang harus dipenuhi perempuan untuk maju jalur independen. Kemudian pengurangan batas kursi DPRD untuk pencalonan jalur partai politik dan menerapkan mekanisme kuota perempuan sebagai pengurus partai politik. Saran terhadap penelitian ketiga dari Rika Novitasari dan Tikka Dessy Harsanti yakni harus meningkatkan peran perempuan dalam urusan publik. Pengaruh globalisasi memberikan dorongan untuk memberikan akses yang luas bagi perempuan untuk terlibat aktif dalam setiap pengambilan kebijakan Negara. Selanjutnya saran kepada penelitian Siti Khodijah yakni penting membangun nilai bagi seorang perempuan untuk maju sebagai kepala daerah. Menjalin relasi yang luas kepada masyarakat dan kepada partai politik yang bisa menjadi kendaraan politik untuk maju dalam pemilihan. Terakhir saran untuk penelitian Zahira kepada calon kepala daerah dalam meredam isu negatif dari lawan politik harus lebih bijak dan hati-hati. Bersikap tenang dalam melakukan klarifikasi atas isu yang berkembang dalam masyarakat.

Dalam penelitian ini memiliki kekhasan tersendiri terutama dalam menganalisis modal politik seorang calon kepala daerah. Kasmarni berhasil

memenangkan kontestasi Pilkada kabupaten Bengkalis Tahun 2020 meski ada isu miring yang menjadi tantangan yang dihadapi.¹⁶ Kemudian hambatan dari kebudayaan mayoritas masyarakat bengkalis yang lebih mempercayakan kepemimpinan kepada laki-laki. Peneliti akan menganalisis modal-modal politik Kasmarni pada Pilkada Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 dengan teori modal politik.

1.2 Rumusan Masalah



Bengkalis merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Riau yang letaknya berada di kawasan perbatasan Selat Malaka, berbatasan langsung dengan Semenanjung Malaya. Kabupaten Bengkalis terhubung erat dengan adat dan istiadat suku Melayu. Dalam budaya adat dan istiadat yang dipegang masih mempercayakan kepemimpinan dipegang oleh laki-laki ketimbang perempuan. Pada tahun 2020 terpilih 2 Bupati Perempuan dari 9 Kabupaten di Provinsi Riau yang menyelenggarakan Pilkada tingkat kabupaten/kota. Kepala daerah perempuan yang terpilih yakni Kasmarni sebagai Bupati Kabupaten Bengkalis dan Rezita Meylani sebagai Bupati Kabupaten Indragiri Hulu. Menariknya Kasmarni terpilih di tengah suaminya yang juga bupati sebelumnya yakni Amril Mukminin menjadi tersangka

¹⁶ Hariantimes.com. 2019. "Kasmarni : Tantangan Besar dalam Hidup Saya" selengkapnya di <https://hariantimes.com/read-3378-2019-12-16-Kasmarni--tantangan-besar-dalam-hidup-saya.html> Diakses pada tanggal 20 Januari 2023 pukul 20.45 WIB.

kasus korupsi. Tentunya dengan adanya kasus tersebut menjadi tantangan besar yang dihadapi Kasmarni untuk mengikuti Pilkada Kabupaten Bengkalis.¹⁷

Amril Mukminin divonis sebagai tersangka kasus korupsi atas dugaan penerimaan uang suap sebesar Rp5,6 Miliar atas proyek pembangunan jalan Duri-Sei Pakning di Kabupaten Bengkalis. KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) menyampaikan bahwa Amril Mukminin diduga menerima awalnya 2,5 Miliar atas proyek peningkatan jalan Duri-Sei Pakning *multiyear* tahun 2017-2019. Kemudian pada pertemuan kedua dengan PT Citra Gading Arismata diduga mendapatkan tambahan sebesar Rp3,1 Miliar. Amril terbukti melanggar pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 atau pasal 12B UU Tipikor juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Amril Mukminin melanggar pasal 12 huruf a UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan telah diamandemen dengan UU No. 20 tahun 2001 pasal 64 ayat 1 KUHP. Amril Mukminin mendapatkan hukuman 6 tahun penjara dengan denda 500 juta tetapi akhirnya mendapatkan emisi menjadi empat tahun penjara dengan subsidi enam bulan kurungan.¹⁸

Pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Bengkalis tahun 2020 melibatkan empat pasangan calon. Keempat calon tersebut yakni Kaderismanto berpasangan dengan

¹⁷ Kumparan.com. 2020. "Sejarah Terukir: 2 Wanita Riau ini Gantikan Posisi Suami Sebagai Bupati" selengkapnya di <https://kumparan.com/selasarriau/sejarah-terukir-2-wanita-riau-ini-gantikan-posisi-suami-sebagai-bupati-1unoOBgi5X/full>. Diakses pada tanggal 21 Desember 2022 pukul 21.05 WIB.

¹⁸ News.detik.com. 2020. "Jejak Kasus Amril Bupati Bengkalis Nonaktif Hingga Divonis 6 Tahun Bui" selengkapnya di <https://news.detik.com/berita/d-5251540/jejak-kasus-amril-bupati-bengkalis-nonaktif-hingga-divonis-6-tahun-bui>. Diakses pada tanggal 22 Januari 2023 pukul 20.50 WIB.

Iyeth Bustami diusung oleh PDI dan PKB. Kemudian Abi Bahrhun berpasangan dengan Herman diusung oleh PKS dan PPP. Selanjutnya Kasmarni berpasangan dengan Bagus Santoso diusung oleh PAN, Gerindra, PBB, Demokrat, dan Nasdem. Terakhir Indra Gunawan Eet berpasangan dengan Samsu Dalimunte diusung oleh Golkar dan Perindo.¹⁹

Terdapat dua perempuan maju sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah pada pemilihan kepala daerah Bengkalis yaitu Kasmarni sebagai calon kepala daerah dan Iyeth Bustami sebagai calon wakil kepala daerah. Jika berfokus kepada aktor utama yaitu bupati berarti hanya terdapat satu orang calon bupati perempuan yakni Kasmarni. Menurut Kasmarni, keinginan untuk maju sebagai calon bupati didukung oleh suami dan anak-anak serta permintaan dari banyak masyarakat Kabupaten Bengkalis. Hal tersebut menjadi penyemangat untuk konsisten melangkah dalam kontestasi Pilkada. Melalui visi dan misi yang telah dipersiapkan dengan matang untuk membangun Kabupaten Bengkalis lebih baik.²⁰

Meskipun menjadi satu-satunya calon kepala daerah perempuan pada Pilkada Kabupaten Bengkalis, Kasmarni berhasil membuktikan diri layak terpilih menjadi kepala daerah berdasarkan *track record* yang dimiliki. Berdasarkan hasil perhitungan

¹⁹ Kesbangpol.bengkaliskab.go.id. 2020. "KPU Tetapkan 4 Paslon Bupati dan Wakil Bengkalis" selengkapnya di <https://kesbangpol.bengkaliskab.go.id/web/detailberita/832/kpu-tetapkan-4-paslon-bupati-dan-wakil-bengkalis>. Diakses pada tanggal 21 Desember 2022 pukul 21.32 WIB.

²⁰ Halloriau.com. 2019. "Optimis mendaftar sebagai calon bupati, Kasmarni melangkah dengan bismillah" selengkapnya di <https://halloriau.com/m/read-120726-2019-10-17-optimis-mendaftar-sebagai-balon-bupati-Kasmarni-melangkah-dengan-bismillah.html>. Diakses pada tanggal 08 Maret 2023 pukul 21.27 WIB.

suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bengkalis menunjukkan bahwa pasangan Kasmarni dan Bagus Santoso berhasil memenangkan kontestasi Pilkada dengan mengalahkan tiga pasangan calon lainnya.

Tabel 1. 2
Rekapitulasi Perolehan Suara Masing-Masing Paslon Pada Pilkada Kabupaten Bengkalis Tahun 2020

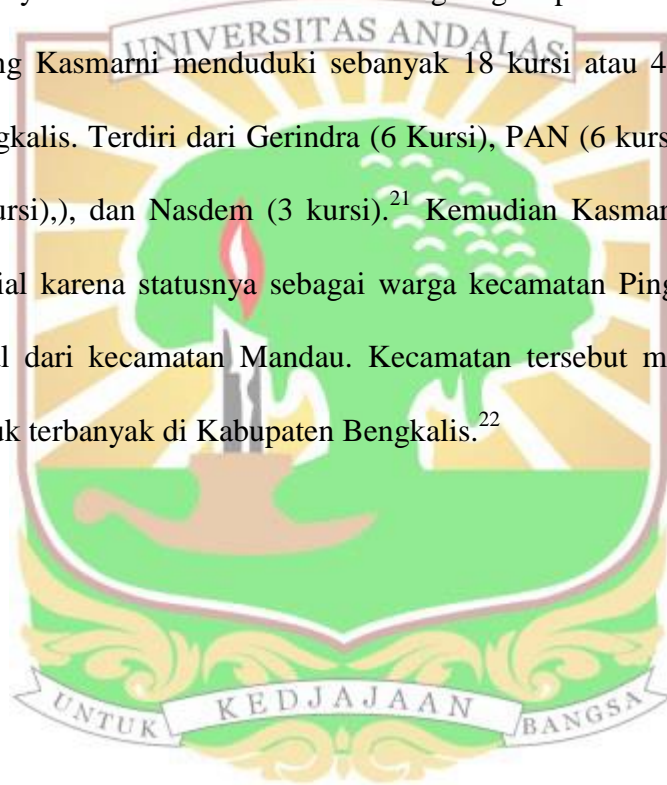
No	Pasangan Calon	Partai Pendukung	Perolehan Suara	Persen (%)
1.	Kaderismanto dan Iyeth Bustami	PDI, PKB	50.570	18,2
2.	Abi Bahrun dan Herman	PKS, PPP	64.276	23,1
3.	Kasmarni dan Bagus Santoso	PAN, GERINDRA, PBB, DEMOKRAT, NASDEM	91.219	32,8
4.	Indra Gunawan Eeet dan Samsu Dalimunte	GOLKAR, PERINDO	71.832	25,8
Total Suara Sah			277.891	100

Sumber : Data Sekunder KPU Bengkalis

Tabel di atas memperlihatkan bahwa Kasmarni berhasil terpilih sebagai bupati perempuan pertama di Kabupaten Bengkalis pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020. Berhasil mengalahkan tiga pasang kandidat lainnya dengan perolehan suara sebanyak 91.291 Ribu jiwa. Tentunya ini menjadi sejarah baru dikarenakan sejak pertama kali menjadi kabupaten yakni tahun 1945 hingga tahun 2020 belum ada dari perempuan yang menjadi bupati di Kabupaten Bengkalis.

Dalam penelitian ini peneliti menduga modal utama yang digunakan dalam kemenangan Kasmarni disebabkan oleh modal politik yang didukung oleh modal

sosial, modal ekonomi, modal simbolik, dan modal budaya. Selain itu partai pendukung dinilai memiliki kontribusi sebagai modal untuk meraih dukungan yang banyak dari masyarakat. Meskipun suami Kasmarni yakni Amril Mukminin sebagai bupati sebelumnya terjerat kasus korupsi berpengaruh terhadap kepercayaan publik kepada Kasmarni. Tetapi partai politik pendukung dan tim sukses berhasil untuk meyakinkan masyarakat melalui sosialisasi langsung kepada masyarakat. Koalisi partai pendukung Kasmarni menduduki sebanyak 18 kursi atau 40 % kursi DPRD Kabupaten Bengkalis. Terdiri dari Gerindra (6 Kursi), PAN (6 kursi), PBB (1 kursi), Demokrat (2 kursi), dan Nasdem (3 kursi).²¹ Kemudian Kasmarni juga didukung oleh modal sosial karena statusnya sebagai warga kecamatan Pinggir dan sebagian keluarga berasal dari kecamatan Mandau. Kecamatan tersebut menjadi kecamatan dengan penduduk terbanyak di Kabupaten Bengkalis.²²



²¹ Kesbangpol.bengkaliskab.go.id. *Op.Cit*

²² Bengkaliskab.bps.go. 2019. "Jumlah Penduduk Kabupaten Bengkalis Menurut Registrasi Disdukcapil". Selengkapnya di <https://bengkaliskab.bps.go.id/indicator/12/30/1/jumlah-penduduk-kab-bengkalis-menurut-registrasi-disdukcapil.html>. Diakses pada tanggal 20 April 2023 pukul 21.30 WIB.

Gambar 1.1

Sosialisasi Kasmarni Ke Rumah Masyarakat

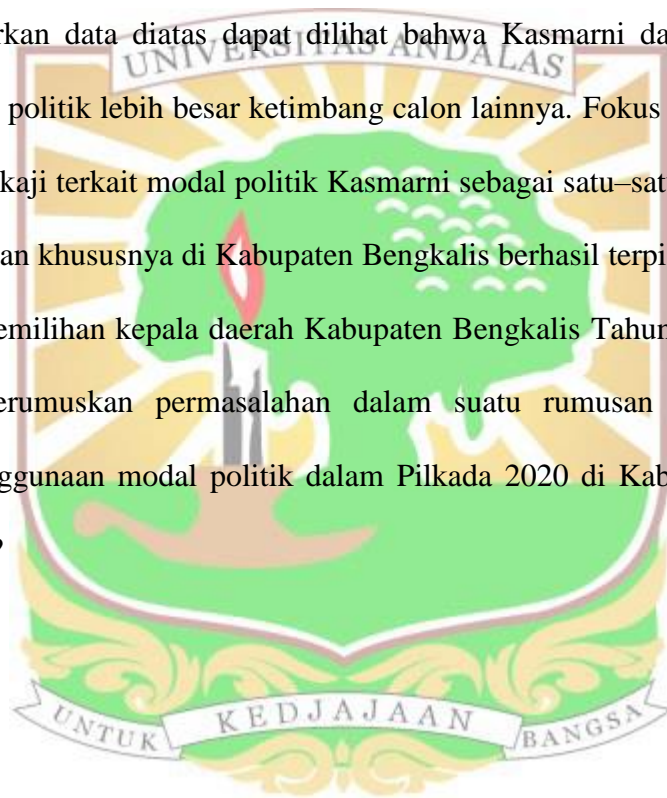


Sumber : Catatan Riau.com

Selain itu Kasmarni juga didukung oleh faktor modal ekonomi yang didukung oleh jumlah kekayaan. Berdasarkan data dari Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) terkait jumlah kekayaan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah terkaya diperoleh oleh calon nomor urut 3 yakni Kasmarni dengan jumlah kekayaan sebesar Rp11.500.243.097. kemudian ditambah dengan kekayaan Bagus Santoso sebesar Rp8.882.368.703. Sedangkan pasangan lain jumlah kekayaan berada dibawah mereka. Pasangan nomor urut 1 yakni Kaderismanto memiliki kekayaan sebesar Rp608.696.932.00. Namun memiliki utang senilai Rp616.981.317.00, sehingga mengalami penurunan sebesar Rp8.284.385. Pasangannya yakni Sri Barat Iyeth Bustami memiliki kekayaan sebesar

Rp7.998.943.196. Pasangan calon nomor 2 yakni Abi Bahrun memiliki kekayaan sebesar Rp2.735.500.000. Sedangkan pasangannya yakni Herman memiliki kekayaan sebesar Rp660.386.560. Terakhir pasangan calon nomor 4 yakni Indra Gunawan Eet memiliki kekayaan sebesar Rp311.011.297.00,-. Sedangkan pasangannya memiliki kekayaan sebesar Rp2.868.252.998.²³

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa Kasmarni dan Bagus Santoso memiliki modal politik lebih besar ketimbang calon lainnya. Fokus pembahasan pada penelitian mengkaji terkait modal politik Kasmarni sebagai satu-satunya calon kepala daerah perempuan khususnya di Kabupaten Bengkalis berhasil terpilih sebagai kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2020. Maka dari itu peneliti merumuskan permasalahan dalam suatu rumusan masalah yaitu : Bagaimana penggunaan modal politik dalam Pilkada 2020 di Kabupaten Bengkalis oleh Kasmarni ?



²³ Potretnews.com. 2020. "Kasmarni Calon Bupati Bengkalis Terkaya Kaderismanto Termiskin". Selengkapnya di <https://www.potretnews.com/berita/baca/2020/09/27/Kasmarni-calon-bupati-bengkalis-terkaya-kaderismanto-termiskin/>. Diakses Pada Tanggal 22 April 2023 pukul 21.26 WIB.